



PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Mujayaroh

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto

Rohmat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Corresponding author: ibumujayaroh@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>

ABSTRACT

To ensure the learning process takes place, financing management is needed which is used as a reference in managing and allocating education funds. Sources of funds originating from the central, regional and community sources of funds must be used effectively in order to achieve educational goals. Education funds must be accountable for their use in accordance with the priority scale needed for the sustainability of the quality of education which correlates with the cost of education. It is hoped that proper management and allocation of education funds will be able to address the need for funds which are a prerequisite for a quality learning process.

Keywords: *management, education funds, allocations, educational institutions*

ABSTRAK

Untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran dibutuhkan manajemen pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan. Sumber sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat, daerah maupun sumber dana yang

berasal dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dana pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan untuk keberlangsungan mutu pendidikan yang berkolerasi dengan biaya pendidikan. Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang tepat diharapkan mampu untuk mengatasi kebutuhan dana yang menjadi syarat berlangsungnya proses pembelajaran yang berkualitas.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Pendidikan, Alokasi, Lembaga Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Diskusi tentang mutu pendidikan, akan berkaitan langsung dengan peran pimpinan sekolah/madrasah sebagai manajer lembaga pendidikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang bermutu. Sementara untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu sangat membutuhkan sumber dana yang memadai dan dikelola secara benar. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. (Usman, 2017).

Mutu pendidikan sangat berkorelasi dengan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi struktur organisasi secara tepat. Dalam menjalankan roda organisasi lembaga pendidikan membutuhkan pemimpin yang dapat mengefektifkan sumber daya menjadi sumber kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. (Sukino, 2016) Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan sarana investasi sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Investasi di bidang sumber daya manusia pada prinsip hampir sama dengan konsep investasi manusia yang nilainya bisa berkembang melalui proses pengembangan dari pendidikan yang telah ditempuh. (Syariful Sagala 2011). Mengingat pentingnya investasi SDM untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia kedepan maka diterbitkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 "Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedisiplinan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berlakunya otonomi daerah memberi kewenangan dan peran yang lebih besar dalam mengelola pendidikan sampai ke tingkat madrasah. Pendanaan pendidikan dan penyaluran dana sampai ke tingkat madrasah berasal dari berbagai sumber yaitu 1) desentralisasi yaitu dana dialokasikan dari dana pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/ kota dalam bentuk DAU dan DAK, selanjutnya pemerintah kabupaten/ kota mengalokasikan dana tersebut melalui APBD untuk sektor pendidikan 2) dekonsetrasi yaitu dana dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dari provinsi dana disalurkan ke madrasah atau ke pemerintah kabupaten/ kota dan diteruskan ke madrasah c) blockgrant dimana dana dialokasikan langsung

dari pemerintah pusat ke madrasah dalam berbagai bentuk. Di tingkat madrasah ini, kepala madrasah memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber tersebut (Suwandi 2012).

Kepala madrasah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan madrasah (Mulyasa: 2005:190), (Masditou 2017). Dana pendidikan di madrasah direncanakan dan dialokasikan secara baik dan tepat sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan pendidikan. Dana pendidikan juga harus diorganisir secara baik dan tepat sasaran. Menurut undang undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan madrasah harus dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai pendidikan secara tepat sehingga tidak ada dana yang pengalokasiannya menimbulkan terjadinya ketidakadilan. (Gitman & Zutter, 2015) dan terjadi tumpang tindih sehingga perlu dibuat mekanisme pendanaan pendidikan yang tepat sehingga dana yang ada dapat dialokasikan secara adil, merata, efisien dan efektif.

Artikel ini secara khusus membahas pengelolaan dana pendidikan di madrasah sebagai cara mengefektifkan program kerja lembaga pendidikan. Melalui eksplorasi studi pustaka informasi cara mengelola dana pendidikan dapat dijelaskan secara jelas dan mendalam sebagaimana dalam pembahasa artikel ini.

B. METODE

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang peneliti lakukan dalam mengambil data. Data yang diambil berhubungan dengan tema yang dibahas dan ditelaah pada artikel ini dan bersumber dari data primer dan sekunder serta dibahas menggunakan metode deskriptif analitis. Peneliti mengambil dari dokumen berupa buku, jurnal, artikel, dan makalah serta peneliti juga melakukan wawancara terhadap bendahara DIPA, BOS dan komite yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). RKS/RKM merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai beserta komite sekolah

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dari RKM selanjutnya akan diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya akan diwujudkan kedalam RAPBM. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang memiliki Tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar dari pengelolaan keuangan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas.

Kunci keberhasilannya dalam pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan secara bertahap dari tahun ke tahun berikutnya dan berkesinambungan sesuai perencanaan program. Pemerintah memegang peranan penting demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan yang termaktub dalam pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa". (Anwar Arifin 2013)

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (Arifin n.d.). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir sama, yaitu 1) peningkatan potensi SDM yang berkualitas 2) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan 3) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana 4) efektifitas dan efisiensi penggunaan dana 5) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) 6) meminimalkan permasalahan terkait penggunaan pembiayaan pendidikan (Ferdi 2015).

Pembiayaan pendidikan sebagai wujud dari implementasi konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) pada hakikatnya menampilkan konsep pengelolaan anggaran pendidikan dengan tujuan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan secara efektif dan efisien dengan harapan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Untuk mengatasi masalah keterbatasan dana di madrasah yang dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, madrasah harus mampu membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada peningkatan mutu. Apabila madrasah dihadapkan pada kebutuhan dengan pembiayaan terbatas maka madrasah perlu mempertimbangkan skala prioritas yang diasumsikan memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas yang dari ketersediaan dana maka kepala madrasah dengan manajemen strategik yang berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan keuangan. Upaya yang dapat dilakukan kepala

madrasah sebagai perwujudan MBS maka strategi yang bisa dilakukan adalah 1) melakukan analisis internal dan eksternal terhadap semua potensi sumber dana 2) mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber sumber dana yang bisa digali dan dikembangkan 3) menetapkan sumber sumber dana melalui musyarah dengan musyawarah dengan (a) orang tua siswa baru pada awal ajaran (b) musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah (c) menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah. Adapun langkah langkah yang bisa dilakukan dalam pengelolaan dana pendidikan adalah (Mulyasa 2003).

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Pendidikan

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di madrasah. Dalam hal ini Gordon dalam Manajemen berbasis sekolah (Mulyasa: 2003:73) penyusunan anggaran pendidikan melalui dua pendekatan yaitu, yaitu pendekatan tradisional an *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) (Mulyasa 2003).

The traditional Approach Steges (1) As certain teacher needs in the areas of supplies, book, etc, (2) Determine the merits of teacher budgets requests on the basis of perceived need (3) Estimate the cost catagories of need, e.g. instruction supplies books, etc. PPBS Stages (1) Asseses educational needs; (2) Define educational objectives and criteria and methods to be used in evaluating the objectives; (3) Detemine programs and cost sstimate the resaource needed to carry out programs; (5) Organize the budget around program areas and objective

Ada dua bagian dalam penganggaran yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penggunaan anggran pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan, Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran. Lipham (1985) dalam Mulyasa. (Mulyasa 2003). Ada tiga cara pandang yaitu 1) *Comparative Approach* penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap bagian anggaran untuk setiap tahun 2) *The Planning Programming Budgeting Evaluation* penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Anggaran ini dianalisis antara dana pelaksanaan dengan rencana berdasarkan analisa anggaran berbasis nol. 3) *Functional approach* penganggaran dalam bentuk gabungan unsur anggaran *comparative Approach* dan *The Planning Programming Budgeting Evaluation*.

b. Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran disusun melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi (1) sumber pendapatan (2) pengeluaran, misalnya

untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran dan honor serta kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini (Lipham, 1985) mengungkapkan empat fase kegiatan yaitu:

- 1) Merencanakan anggaran, kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisa *Cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran serta dirumuskan dengan jelas, melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan bahan yang tersedia.
- 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan administrasi, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi .membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
- 4) Menilai pelaksanaan anggaran, menilai proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

c. Proses pengaturan meliputi

- 1) Penerimaan, bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat
- 2) Penggunaan
- 3) Pertanggungjawaban anggaran

Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya. (Masditou 2017) Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. (Martin 2014)

2. Pengalokasian Dana Pendidikan

Pengalokasian atau distribusi anggaran pendidikan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah (Depdiknas: 2009). Dalam konteks ini fungsi pemimpin madrasah/sekolah sangat menentukan karena pengabila kebijakan dalam masalah anggaran ditentukan oleh kepala sekolah. (Rohmat, 2016) Dalam rangka pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) ,yang penyusunannya bisa dilakukan secara rutin tiap satu tahun sekali dan bisa dilakukan tiap semester dilakukan oleh kepala madrasah, guru, siswa, bendahara dan komite sekolah sesuai dengan tahapan tahapan penyusunan anggaran (Fatah, 2012) mengungkapkan anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik perencanaan maupun pengawasan .oleh karena itu ,ketepatan desain anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. (Ainul Mardiyah Usman 2017). Pihak madrasah menyusun RAPBS berdasarkan anggaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya pemeliharaan,serta belanja modal. APBK diperuntukan untuk insentif wali kelas. Pengalokasian dana yang bersumber dari APBN diperuntukan untuk pengembangan kompetensi lulusan seperti biaya insentif pengayaan sore hari, pengembangan profesi guru, pembiayaan remedial dan pengayaan, PMR dan rehabilitas gedung, pengadaan mebeler yang dianggap sedang dan tidak terlalu beasr dana yang dibutuhkan. Adapun pengalokasian dana pendidikan dapat diperuntukan sebagai berikut

a. Pengalokasian dana DIPA

Menurut undang undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang undang No1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara(BUN). Adapun penggunaan dana DIPA adalah sebagai berikut

- 1) Belanja pegawai (kode 51)
- 2) Belanja barang (kode 52)
- 3) Belanja modal (kode 53)
- 4) Belanja gaji pegawai, belanja tunjangan seperti sertifikasi dan tukin.

b. BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah)

Adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib

belajar, Adapun dana BOS dialokasikan sebagai berikut

- 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
- 4) Kegiatan asesmen / evaluasi pembelajaran
- 5) Administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Layanan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Pembayaran guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN)

c. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan sudah diatur dalam UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi komite sekolah harus mampu menyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan. Adapun penggunaan dana komite di alokasikan antara lain

1. Pengadaan sarana dan prasarana
 - a. Pengadaan toilet siswa
 - b. Pembuatan sarana olah raga
 - c. Pembuatan gedung aula
 - d. Pembuatan ruang kelas
2. Dana sosial untuk siswa sakit
3. Penghargaan siswa berprestasi dan beasiswa siswa berprestasi jalur akademik maupun non akademik
4. Kegiatan kreatifitas siswa
 - a. Karnaval
 - b. Acara pentas seni pada saat pelepasan siswa baru

- c. Bulan bahasa
- d. Expo kampus
- e. Kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional

Seluruh pengalokasian dana harus selalu di evaluasi bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antara lain (Kementrian Pendidikan Nasional 2010).

Komponen	Aspek	Jenis Dokumen SNP
Biaya Investasi	Penyusunan RAPBM	Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah
	Sarana dan Prasarana	Dokumen catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh
	Pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan	Dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAS untuk pemenuhan SNP
Modal Kerja		Dokumen modal kerja (operasional) untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
Biaya Operasional	Gaji Pendidik	Dokumen pembayaran gaji insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
	Gaji tenaga Kependidikan	Dokumen pembayarangaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
	Kegiatan Pembelajaran	Dokumen pengalokasian Biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama Tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP

	Kegiatan Kesiswaan	Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP
	ATK	Dokumen pengeluaran Biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP
	Bahan habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
	Alat habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
	Kegiatan Rapat	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat
	Transport dan perjalanan dinas	Dokumen pengeluaran biaya transport dan perjalanan dinas
	Penggandaan soal soal ujian	Dokumen biaya pengeluaran penggandaan soal ujian
Biaya operasional	Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung	Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional Tidak langsung selama tiga tahun terakhir
	Sumbangan pendidikan	Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan
	Uang sekolah	Dokumen pemungutan atau sumbangan uang sekolah
	Subsidi silang	Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
	Biaya operasional lain	Dokumen penggalangan biaya operasional lain disamping iuran komite rutin dan fisik sekolah
	Penetapan biaya operasional	Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana Dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak
	Pengelolaan biaya operasional	Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat
Transparansi dan akuntabilitas	Pedoman pengelolaan keuangan	Dokumen pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS (RAPBS)
	Pembukuan biaya operasional	Dokumen pembukuan biaya operasional

Laporan pertanggung jawaban	Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau Yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana
-----------------------------	--

Dari seluruh tahapan pengelolaan dan pengalokasian dana kegiatan evaluasi merupakan tahapan terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Nanang Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk

- a. Memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.

D. KESIMPULAN

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang selanjutnya akan diwujudkan dalam RKS/RKM yang merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai beserta komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dari RKM selanjutnya akan diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya akan diwujudkan ke dalam RAPBM.

Dalam rangka pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan engambil kebijakan (pimpinan sekolah/madrasah) harus selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas dari ketersediaan dana dengan mempertimbangan antara ketersediaan dana dengan kebutuhan yang lebih utama dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Mardiyah Usman, dkk. (2017). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Pecontohan Banda Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*, ISSN 2302-0156 pp. 235-249, Volume 5. No 4. November
- Anwar Arifin, (2003). Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang Undang SISDIKNAS, Departemen Agama RI Jakarta
- Ferdi W, P. (2015). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 19 Nomor 4. Desember.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance 14th Edition*. In Pearson Education.
- Masditou (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal Ansiru PAI vol.1 No.2*. Juli-Des.
- Nanang Fattah (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Pendidikan Nasional (2010). *Instrument Dokumen Portofolio*, Jakarta.
- Martin (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Suwandi (2012). Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Vol 21. No 2167
- Rohmat (2016). Relasi Kepemimpinan dan Kultur Sekolah. *Jurnal Kependidikan Insania*.
- Syaiful Sagala (2011). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. ALFABETA: Bandung.
- Brzozowski, M., & Ferster, I. (2016). Educational Management Leadership. In *Educational Leadership and Administration*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1624-8.ch001>
- Cobb-Clark, D. A., & Jha, N (2016). Educational Achievement and the Allocation of School Resources. *Australian Economic Review*. <https://doi.org/10.1111/1467-8462.12159>
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance 14th Edition*. In Pearson Education.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. PT Bumi Aksara.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>

- Rohmat. (2016). Relasi Kepemimpinan dan Kultur Sekolah. *Jurnal Kependidikan Insania*.
- Sari, D. N. A. (2018). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*.
- Sukino, A. (2016). Kepemimpinan Transformatif dalam Pengembangan Manajemen Madrasah Berorientasi Mutu. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i1.10>
- Usman, J. (2017). Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>

